

**Sumatera Utara**
396 TAMBANG ILEGAL
(emas, pasir, galian tanah)**Jawa Barat**
314 TAMBANG ILEGAL
(pasir, tanah merah, batu kapur,
andesit, emas, marmer, bentonit)**Kalimantan Selatan**
230 TAMBANG ILEGAL
(batu bara)**Kalimantan Tengah**
133 TAMBANG ILEGAL
(emas)**Bangka Belitung**
116 TAMBANG ILEGAL
(timah)

GEGERA TAMBANG ILEGAL, NEGARA RUGI RP 800 TRILIUN

Presiden RI, Prabowo Subianto, buka-bukaan terkait kerugian negara atas maraknya pertambangan ilegal yang ada di tanah air. Presiden Prabowo di sela-sela menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,255 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), mengatakan kerugian negara dari tambang ilegal mencapai Rp 800 triliun selama 20 tahun terakhir. Angka kerugian negara itu cukup fantastis. Sebab, dari Rp 13,25 triliun yang diserahkan Kejagung saja, diperkirakan bisa untuk membangun 8.000 sekolah. Dengan angka kerugian negara tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi, meskipun tindakan korup itu melibatkan orang-orang kuat, baik di level pejabat negara maupun pengusaha besar. Prabowo menandaskan, di bawah kepemimpinannya, pemerintah akan fokus untuk terus membela kepentingan masyarakat secara luas. Karenanya, praktik tindak pidana korupsi yang merugikan rakyat akan diberantas. Bahkan, Prabowo pun siap adu kekuatan.

BACA HAL 11...



Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025). (Foto: setneg)

DISEBUT MEMILIKI SKOR PALING RENDAH, INI KATA BAHLIL

Terkait dengan rilis riset lembaga survei Indostrategi yang menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memiliki skor terendah di Kabinet Merah Putih, dia mengaku dalam setahun Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka banyak pencapaian, tapi ada juga catatan yang mesti dievaluasi.

Kami tahu bahwa dalam satu tahun ini pasti ada plus minus lah, pasti ada kekurangan dan kelebihan," kata Bahlil di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Bahlil mengatakan anggota kabinet pasti akan mempertahankan segala pencapaian dalam satu tahun ini. Atas arahan presiden, anggota kabinet juga akan memperbaiki kinerja yang belum optimal.

Bahlil meyakini bahwa semua menteri bekerja demi kesejahteraan rakyat, meski memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya. "Tidak ada manusia sempurna di dunia ini," kata Bahlil.

Sehari sebelumnya, Bahlil mengatakan yang berhak menilai kinerja anggota kabinet adalah Presiden Prabowo. Sebab, para menteri hanya menjalankan tugas dan perintah Presiden Prabowo dengan tetap berpegang pada ketentuan undang-undang. "Jadi, yang berhak menilai kinerja para menteri hanyalah Presiden," kata Bahlil dikutip tempo.

Survei Indostrategi menggunakan metode penilaian dengan skala 0 hingga 5 ini memberikan Bahlil skor 2,47. Laporan itu menyatakan, isu lingkungan serius menjadi faktor negatif dalam kinerja Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil. "Banyak tambang merusak ekosistem (misalnya kasus Raja Ampat), sementara kebijakan ESDM sering mengorbankan aspek keberlanjutan," tulis laporan Indostrategi dikutip Sabtu (18/10/2025).

Lalu, yang juga menjadi catatan adalah transisi energi bersih dianggap lamban, ketergantungan pada batu bara masih tinggi, hingga peta jalan energi hijau belum jelas.

Kemudian, laporan menyatakan subsidi energi tidak tepat sasaran dan sering menyebabkan inefisiensi fiskal serta distorsi harga.

Faktor negatif lainnya adalah sistem informasi dan data sektor energi, mineral, dan batu bara (minerba) lemah yang menyebabkan tumpang tindih perizinan, celah korupsi, dan lemahnya pengawasan penerimaan negara.

Kasus korupsi dan oligarki pertambangan juga dianggap



Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Dok. Kementerian ESDM)

menurunkan kredibilitas kebijakan hilirisasi. Survei juga menyatakan bahwa koordinasi lintas kementerian lemah, terutama dalam tata kelola lahan, kehutanan, dan minerba. "Kinerja komunikasi publik Menteri ESDM dinilai retorik dan tidak diimbangi eksekusi konkret di lapangan," tulis laporan itu.

Indostrategi juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian, terutama dalam tata kelola lahan, kehutanan, dan minerba. Sementara itu, kinerja komunikasi publik Bahlil disebut retorik dan tidak diimbangi dengan langkah konkret di lapangan.

Meski begitu, laporan ini juga mencatat beberapa capaian positif Kementerian ESDM. Program hilirisasi mineral, terutama

nikel untuk industri baterai kendaraan listrik, dianggap berhasil meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar Indonesia di pasar global. Selain itu, kebijakan satu pintu impor bahan bakar minyak (BBM) dinilai memperbaiki efisiensi distribusi energi, serta penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) mulai berjalan untuk mengurangi tambang ilegal.

Direktur Riset Indostrategi, Ali Noer Zaman, mengatakan hasil survei ini perlu dilihat dalam konteks masa transisi dan konsolidasi kabinet. Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran masih membutuhkan waktu untuk menata ulang nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas antar-kementerian. "Namun publik

tetap harus mengawasi agar pemerintah bekerja keras dan tidak kehilangan arah," ujarnya.

IndoStrategi juga merilis 10 kementerian terbaik yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Abdul Mu'ti) dengan skor 3,35; Kementerian Luar Negeri (Sugiono) dengan skor 3,32; Kementerian Agama (Nasaruddin Umar) dengan skor 3,26; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Brian Yulianto) dengan skor 3,22; Kementerian Pertanian (Amran Sulaiman) dengan skor 3,21; Kementerian Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) dengan skor 3,15; Kementerian Dalam Negeri (Tito Karnavian) dengan skor 3,14; Kementerian Pertahanan (Sjafrie Sjamsoeddin) dengan skor 3,13; Kementerian Kehutanan (Raja Juli Antoni) dengan skor 3,08; dan Kementerian Investasi/BKPM (Rosan Roeslani) dengan skor 3,08.

"Berdasarkan hasil penelitian kami, Kemendikdasmen dengan Menteri Abdul Mu'ti menempati posisi pertama dengan skor 3,35," ujar Ali Noer Zaman dilansir Kompas, Jumat (17/10/2025).

Dia mengatakan, Kemendikdasmen yang mendapatkan skor tertinggi disebabkan oleh Abdul Mu'ti sebagai menteri yang dinilai berhasil menghadirkan sejumlah inovasi. Mulai dari redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN), pembaharuan sistem kinerja guru dan kepala sekolah, hingga sistem penerimaan murid baru.

Ali menilai, Kemendikdasmen yang dipimpin Abdul Mu'ti berhasil menghadirkan inovasi yang adaptif terhadap pemerataan kualitas dan kebutuhan pendidikan di era digital. "Inovasi pembelajaran deep learning dan coding diapresiasi sebagai langkah adaptif terhadap era digital. Program redistribusi guru ASN mulai memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan di daerah," ujar Ali.

Riset IndoStrategi dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode purposive sampling dengan melibatkan 424 responden dari 34 provinsi. Para responden dipilih berdasarkan pendidikan minimal strata satu (S1) dan pekerjaan tetap seperti guru, dosen, aktivis, karyawan, atau pengusaha.

Selain wawancara langsung, penelitian ini juga menganalisis sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta pandangan para pengamat dan akademisi. IndoStrategi juga melibatkan 10 ahli dari berbagai bidang dalam diskusi kelompok terpusat (FGD) untuk memperkuat hasil analisis. (han,ist/lut)

“

Kami tahu bahwa dalam satu tahun ini pasti ada plus minus lah, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Jadi, yang berhak menilai kinerja para menteri hanyalah Presiden,"

BAHLIL LAHADALIA
Menteri ESDM

ANGGOTA DPR MINTA PEMERINTAH LEBIH KETAT MENGAWAL MBG

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta pemerintah untuk mengawal implementasinya secara lebih ketat. Edy mengharapkan dengan pengawasan tersebut tujuan utama dari program andalan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki gizi dan menggerakkan ekonomi rakyat kecil berlangsung dengan lancar.

Program MBG telah menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia sejak kick off perdananya pada Senin, 6 Januari 2025. Namun, di balik capaian besar itu, muncul persoalan serius, yakni kasus keracunan makanan, lemahnya pengawasan keamanan pangan, dan belum adanya dasar hukum yang kuat.

"MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi," ujarnya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia mengatakan hal tersebut sebagai bentuk evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengatakan laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) pada 13 Oktober 2025, sejak awal pelaksanaan program itu, 11.566 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari penyelenggara MBG. Sebagian besar korban mengalami gejala mual, muntah, hingga diare.

Dia mengatakan bahwa fakta itu menunjukkan kelemahan sistem keamanan pangan di lapangan, sekaligus belum tuntas regulasi tata kelola program.

"Pemerintah memang menyebut rancangan peraturan presiden tentang MBG sedang dalam proses harmonisasi. Tapi, program ini sudah berjalan hampir setahun tanpa payung hukum yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan cenderung semrawut," kata dia.

Hingga Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 11.567 Satuan Pelaksana Pangan Bergizi (SPPG) beroperasi di seluruh Indonesia. Program itu juga telah menjangkau 35,8 juta penerima manfaat dengan 9.026 UMKM lokal terlibat dalam rantai pasok bahan

baku dan penyediaan makanan.

Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah kemudian mulai mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), merevisi petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP), memberikan sanksi pemberhentian kepada kepala SPPG yang lalai, memperketat verifikasi penyelenggara, serta melaksanakan audit keamanan pangan dan keuangan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Langkah lain, berupa pelatihan penjamah makanan, kewajiban ketersediaan rapid test kit untuk uji cepat kualitas bahan pangan, dan akreditasi terhadap setiap SPPG sebelum beroperasi.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting nasional menurun dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen. Ia lantas mempertanyakan, apakah intervensi MBG akan kembali menurunkan angka stunting? Hipotesis ini harus diuji karena program MBG baru seumur jagung.

"Menurunkan stunting tidak bisa diukur dalam satu tahun. Intervensi gizi harus dilakukan sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia

dua tahun. MBG hanya salah satu bagian dari rantai panjang itu," ucapnya.

Edy mendorong Kementerian Kesehatan dan BGN melakukan survei gizi tahunan terhadap kelompok sasaran MBG untuk memastikan efektivitas program ini. "Kita perlu tahu apakah MBG benar-benar berdampak terhadap status gizi anak-anak," kata dia.

Dia juga mendorong percepatan Perpres Tata Kelola MBG agar seluruh pelaksanaan memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan.

"Keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tapi dari perubahan nyata, yakni gizi anak membaik, kasus keracunan menurun, ekonomi lokal bergerak, dan sistem pengawasan bekerja," tuturnya.

Menurut dia seluruh langkah itu sudah sepatutnya diapresiasi. "Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafik, mengatakan bahwa Program MBG merupakan

wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

"Program tersebut bukan sekadar menyediakan makanan gratis, tapi sebuah investasi besar untuk masa depan bangsa. Kita ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas," ujarnya dalam keterangannya.

Dia pun menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan optimal. Menurut dia, pelibatan pemerintah daerah, sekolah, pelaku usaha pangan, hingga masyarakat menjadi kunci keberhasilan MBG.

"Kita perlu memastikan makanan yang diberikan benar-benar bergizi, aman, dan sesuai kebutuhan anak-anak di setiap daerah," tandasnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli DPR RI, Fadhy menjelaskan bahwa Program MBG merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menekan angka stunting dan malnutrisi.

"Tujuannya jelas, yaitu memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi seimbang supaya tumbuh dengan optimal dan mampu berprestasi di sekolah. Program ini juga memiliki dampak ekonomi karena memberdayakan sektor pangan lokal," jelasnya.

Ande Citra Restiawan dari BGN menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG mengacu pada empat prinsip utama yakni kecukupan kalori, keseimbangan gizi, higienitas, dan keamanan pangan. Menurut dia, menu dalam program MBG itu disusun berdasarkan kebutuhan gizi anak dengan memperhatikan kearifan lokal.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga menyehatkan. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan generasi emas Indonesia 2045," terang Ande.i. (han,ant,ist/lut)



Siswa SD menikmati program MBG. (ist)



MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi,"

EDY WURYANTO
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP

DUIT PEMDA RP215 T NGANGGUR DI BANK

Terbesar Provins DKI Jakarta dan Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah pusat kembali menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di daerah yang menyebabkan dana ratusan triliun rupiah masih mengendap di bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan seharusnya pemda segera menggerakkan dana tersebut untuk kegiatan produktif. Bila tidak, ekonomi daerah akan 'kering'. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap beberapa pemicunya. Mulai dari keterlambatan proses lelang, hambatan sistem e-katalog, hingga kebijakan kepala daerah yang menunda pencairan anggaran.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, berdasarkan data kas daerah, total simpanan pemerintah daerah (pemda) saat ini mencapai Rp215 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan catatan Bank Indonesia (BI) sebesar Rp233 triliun.

"Data kas langsung menunjukkan posisi Rp215 triliun. Jadi bukan Rp233 triliun seperti data BI. Selisih Rp18 triliun ini sedang kami telusuri," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Dari total dana tersebut, sekitar Rp64 triliun berada di tingkat provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota. Adapun simpanan terbesar tercatat di DKI Jakarta dengan lebih dari Rp19 triliun, disusul Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Sementara untuk tingkat kabupaten, Bojonegoro menjadi daerah dengan kas tertinggi, mencapai Rp3,6 triliun.

Menurut Tito, sejumlah faktor membuat dana itu belum terserap optimal — mulai dari keterlambatan proses lelang, hambatan sistem e-katalog, hingga kebijakan kepala daerah yang menunda pencairan anggaran.

"Banyak rekanan memilih mencairkan di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang ingin mengganti pejabatnya dulu, jadi uangnya ditahan," jelas Tito.

Ia menilai fenomena ini menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. "Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, pertumbuhan ekonominya otomatis lemah. Idealnya, pendapatan tinggi diikuti belanja yang tinggi," ujarnya.

Ekonomi Daerah 'Kering'

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan agar pemda segera menggerakkan dana tersebut untuk kegiatan produktif. Ia mencatat realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun atau turun 13,1 persen dibanding periode tahun lalu.

"Dananya sudah ada, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk



pembangunan yang bisa langsung dirasakan masyarakat," tegas Purbaya.

Ia menjelaskan, belanja modal merosot lebih dari 31 persen, sedangkan belanja barang dan jasa turun 10,5 persen, dan belanja lainnya anjlok 27,5 persen.

Penurunan ini, kata dia, menunjukkan perlambatan realisasi anggaran yang berdampak pada ekonomi lokal.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun 10,86 persen menjadi Rp253,36 triliun akibat berkurangnya pajak daerah dan

dividen BUMD. Purbaya menegaskan, daerah harus kembali menggerakkan aktivitas ekonominya agar PAD bisa meningkat.

"Dorong sektor produktif, permudah perizinan, hidupkan UMKM, dan pastikan layanan publik efisien," ujarnya.

Purbaya juga menyoroti praktik pemda yang menempatkan uangnya di bank pusat alih-alih di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Menurutnya, hal itu membuat peredaran uang di daerah tersendat.

"Daerahnya jadi kering, uangnya enggak bisa muter. Walaupun belum dibelanjakan, seharusnya uang tetap disimpan di daerah," katanya. (wid,rls,ist/dya)

Bersikukuh TKD Tak Dinaikkan, Purbaya: Rawan Diselewengkan

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikukuh belum akan menaikkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026, meski desakan dari 18 gubernur sudah mengemuka. Ia menyebut keputusan untuk menambah dana tersebut masih ditahan lantaran pemerintah pusat menilai penggunaannya di sejumlah daerah belum dikelola dengan baik dan berpotensi diselewengkan.

"Beberapa waktu lalu 18 gubernur datang ke tempat saya, mereka meminta agar dana transfer daerah dinaikkan. Saya pribadi tidak keberatan, tapi pimpinan di atas masih ragu karena melihat dana itu sering tidak digunakan sebagaimana mestinya," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Purbaya menegaskan, kenaikan TKD bukan sekadar soal nominal, tetapi juga tanggung jawab moral daerah dalam memastikan uang

rakyat benar-benar sampai kepada masyarakat. Ia mendorong para kepala daerah untuk terlebih dahulu memperbaiki tata kelola dan memperkuat sistem pengawasan agar penyerapan anggaran bisa lebih transparan dan akuntabel.

"Kita akan evaluasi penyaluran TKD di kuartal IV 2025 dan kuartal I 2026. Kalau nanti hasilnya menunjukkan perbaikan signifikan, baru bisa kita pertimbangkan penambahan dana," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat tidak ingin gegabah mengucurkan dana besar tanpa jaminan pengelolaan yang bersih. Ia juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto hanya akan menyetujui kenaikan TKD jika terdapat bukti nyata bahwa pengelolaan anggaran daerah sudah berjalan baik.

"Kalau tata kelola masih amburadul, saya tidak bisa mengusulkan ke atas. Presiden sangat hati-hati dalam hal ini. Tapi kalau sudah terbukti baik, tentu tidak akan ada hambatan untuk

15 PEMDA DENGAN SIMPANAN TERTINGGI BERDASARKAN DATA KEMENTERIAN KEUANGAN

- Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun
- Provinsi Jawa Timur Rp 6,8 triliun
- Kota Banjarbaru Rp 5,1 triliun
- Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun
- Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun
- Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun
- Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun
- Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun
- Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun
- Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun
- Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun
- Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun
- Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun
- Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun
- Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun

menaikkannya," tutur Purbaya.

Ia berharap para gubernur mampu menunjukkan rekam jejak positif dalam dua triwulan mendatang. "Bantu kami juga untuk membuktikan bahwa daerah bisa disiplin dalam mengelola anggaran. Dua kuartal, kuartal IV tahun ini dan kuartal I tahun depan, saya rasa cukup untuk menunjukkan perbaikan," tegasnya. (tin,ant/dya)

MENTAN ANCAM CABUT IZIN PEDAGANG BERAS

Dideadline 2 Minggu Sesuai HET

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras seluruh distributor, pedagang, dan pengecer beras untuk mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Amran menegaskan, jika dalam waktu dua minggu imbauan tersebut tidak diindahkan, ancamannya adalah izin usaha mereka dicabut.

Menurut Amran, langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif pemerintah, melibatkan Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus), Kementerian Perdagangan, dan Bulog. Kolaborasi ini disebutnya sebagai trisula langkah intervensi: himbauan, operasi pasar, dan terakhir penindakan.

"Kami sudah sepakat mengimbau distributor, pedagang, pengecer tolong patuhi regulasi yang ada, yaitu mengikuti HET. Kita imbau dua minggu," kata Andi Amran Sulaiman kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (20/10/2025).

Penindakan pencabutan izin tidak hanya berlaku untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disubsidi, tetapi mencakup semua jenis beras, baik premium maupun medium.

"Kalau masih ada, itu dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf, izinnnya kita sepakat dicabut. Kalau tidak indahkan himbauan pemerintah," tegas Amran.

Ia menambahkan bahwa operasi pasar akan dilakukan secara paralel dan bersifat sementara, dijadwalkan selesai pada awal tahun 2026, sambil menunggu solusi permanen berupa pembangunan sentra produksi pangan di berbagai pulau.

Kementerian Pertanian melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, dan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani untuk membahas mengenai swasembada pangan 2025.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika justru menyarankan agar pemerintah dapat menghapus HET beras premium sehingga pihak swasta dapat menyediakan beras sesuai dengan mekanisme pasar.

Pemerintah, kata dia bisa mengevaluasi dengan melakukan operasi pasar dan menyalurkan beras

SPHP ketika harga sudah sangat mahal. Selain itu, Ombudsman menyarankan pemerintah dapat mengutamakan langkah ultimum remedium, yakni hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.

"Tolong bijaksana, ini beras, sebelumnya pemerintah tidak melakukan pembinaan dan pengawasan. Tiba-tiba sekarang langsung diberlakukan [penegakan hukum] bagi pelau usaha, cemas," ucapnya.

Bagaimanapun, kata dia, pemerintah seharusnya bisa

mengingatnkan pelaku usaha, seperti kandungan menir yang seharusnya 5% namun dalam praktiknya 5,5% atau hanya selisih 0,5%.

"Tinggal diingatkan saja, asal tidak mengurangi bobot berasnya kecuali misalnya beras 5 kg dijual 4 kg, itu penipuan. Kalau di 5 kg itu ada 5% berarti sekitar 25 gram butir menirnya lantas ternyata setelah dicek misalnya ada 30 gram. Oh ini salah melanggar aturan, tapi apa artinya melanggar aturan itu jika pada akhirnya kita dihadapkan dengan kelangkaan beras seperti sekarang ini," ungkap Yeka. (gus,ist,tan/dya)



Pekerja menjemur gabah di sebuah usaha penggilingan padi di Kabupaten Serang, Banten. (ant.dok)

10 PROVINSI DENGAN HARGA BERAS TERMAHAL

DI Yogyakarta
Rp 14.200

Sulawesi Selatan
Rp 14.250

Sumatera Utara
Rp 14.550

Sulawesi Barat
Rp 14.550

Aceh
Rp 14.650

Jawa Timur
Rp 14.800

Lampung
Rp 14.850

Jawa Barat
Rp 14.900

Kepulauan Riau
Rp 14.950

Jawa Tengah
Rp 15.100

Sumber: www.bf.go.id/hargapangan per 20/10/2025

Operasi Pasar Akhir Tahun, Bulog Siapkan 1,5 Juta Ton

PERUM Bulog memastikan ketersediaan stok beras yang masif untuk intervensi pasar guna menahan gejolak harga hingga akhir tahun 2025. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa total beras yang disiapkan untuk Operasi Pasar atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 1,5 juta ton.

"Stok yang disiapkan Bulog untuk operasi pasar adalah 1,5 juta ton. Dari 1,5 juta ton itu sekarang hampir menyentuh angka 500 ribu ton atau setengah juta. Jadi masih ada sisa 1 juta ton," ujar Ahmad Rizal Ramdhani di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (20/10/2025).

Dengan sisa stok cadangan 1 juta ton tersebut, Rizal meyakini masyarakat tidak perlu ragu akan ketersediaan pasokan. Ia bahkan mengklaim stok beras Bulog saat ini merupakan yang terbaik dan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia berdiri, sekaligus mendukung capaian swasembada pangan hingga akhir tahun.

Intervensi pasar ini merupakan

bagian dari kolaborasi tiga pilar yang diinisiasi pemerintah untuk menstabilkan harga beras yang masih cenderung berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan, subsidi pemerintah untuk sektor pangan, khususnya beras, adalah yang paling tinggi, mencapai Rp150 triliun, atau sekitar Rp4.900 hingga Rp5.000 per kilogram beras.

"Subsidi pemerintah sektor pangan khususnya beras yang paling tinggi, subsidi itu Rp150 triliun. Sehingga ini harus dijaga, harus diintervensi karena kita menjaga produsen juga harus menjaga konsumen," tegas Amran.

Untuk memastikan intervensi berjalan, Mentan menyatakan telah berkolaborasi dengan Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Menteri Perdagangan, dan Bulog untuk melaksanakan operasi pasar, himbauan, dan penindakan.

Selain intervensi harga jangka pendek melalui operasi pasar, Amran mengungkapkan bahwa pemerintah juga mengejar solusi permanen, yakni melalui swasembada pangan di

berbagai wilayah kepulauan. Hal ini dilakukan untuk menekan tingginya biaya logistik yang kerap memicu disparitas harga.

"Mimpi kita adalah, itu arahan Bapak Presiden, semua pulau-pulau, swasembada beras, swasembada nantinya minyak goreng, protein, dan seterusnya. Sehingga biaya yang ngangkut itu tidak ditanggung biaya setempat," jelas Amran. (ist,tin/dya)

Kurangi Risiko Banjir, Normalisasi Sungai Tundo Capai 800 Meter

MALANG - Mitigasi potensi banjir menjelang musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang tengah melakukan kegiatan normalisasi Sungai Tundo di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo. Hingga pertengahan Oktober 2025, proses normalisasi sungai tersebut telah mencapai panjang sekitar 800 meter di kedua sisi aliran sungai.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan kegiatan normalisasi Sungai Tundo telah dimulai sejak 1 September 2025.

"Normalisasi ini kami lakukan di Sungai Tundo. Pekerjaannya sudah berjalan sejak awal September dan hingga saat ini telah mencapai sekitar 800 meter di sisi kanan dan kiri sungai," ujar Sadono, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (20/10/2025).

Selain normalisasi aliran sungai, Sadono menyebutkan, BPBD Kabupaten Malang juga melaksanakan pemasangan bronjong untuk memperkuat tebing sungai agar tidak mudah tergerus air.

"800 meter ini berarti sudah titik ketiga. Di titik ini, bronjong yang sudah terpasang berjumlah 24 unit. Total

keseluruhan bronjong yang telah terpasang hingga saat ini mencapai 126 unit dengan panjang keseluruhan 60 meter," katanya.

Adapun dimensi normalisasi Sungai Tundo, dijelaskannya, meliputi lebar sungai sekitar 20 meter, tinggi tanggul antara 2,5 hingga 3 meter, dan lebar tanggul kurang lebih 3 meter. Penataan kembali aliran sungai ini diharapkan mampu memperlancar aliran air dan mengurangi risiko banjir luapan di sekitar permukiman warga.

Sadono juga menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Desa Pujiharjo serta berbagai unsur terkait lainnya. Beberapa instansi yang terlibat antara lain BPBD Kabupaten Malang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Surabaya, Pemerintah Desa Pujiharjo, dan masyarakat sekitar.

"Kami melibatkan berbagai pihak agar prosesnya bisa berjalan efektif dan hasilnya bermanfaat langsung bagi warga," imbuhnya.

Dari catatan BPBD, wilayah Desa Pujiharjo diketahui merupakan salah satu daerah rawan bencana di Kabupaten Malang. Letak geografisnya yang berada di kawasan perbukitan

serta dilewati aliran sungai menjadikan desa ini sering terdampak banjir saat curah hujan tinggi.

Sadono menambahkan, kegiatan normalisasi Sungai Tundo ini merupakan tindak lanjut dari kejadian banjir yang sempat melanda wilayah tersebut beberapa waktu sebelumnya.

"Pada Juni 2025 lalu, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi menyebabkan Sungai Tundo meluap. Air menggenangi beberapa rumah dan jalan desa hingga akses keluar-masuk Desa Pujiharjo sempat tertutup total karena material longsor dan pohon tumbang," terangnya.

Selain itu, BPBD Kabupaten Malang juga mencatat, pada Mei 2025, banjir luapan Sungai Tundo telah merendam sekitar 66 rumah dan 70 kepala keluarga di Desa Pujiharjo dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 40 sentimeter.

Peristiwa tersebut menjadi salah

Normalisasi Sungai Tundo, Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.
(dok. Pusdalops BPBD Kab Malang)



satu dasar bagi BPBD untuk melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum memasuki puncak musim hujan.

Sadono menegaskan, kegiatan seperti normalisasi sungai dan pemasangan bronjong menjadi bagian penting dari upaya jangka panjang BPBD dalam mengurangi risiko bencana banjir di wilayah selatan Kabupaten Malang. (Santi/Dya)

Enam Kursi Pejabat Kosong, BKPSDM Tunggu Petunjuk Wali Kota Malang



Plt Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono. (Santi/Lentera)

MALANG - Hingga Oktober 2025, sebanyak enam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih kosong. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang memastikan, proses pengisian

tersebut.

"Bisa dengan langsung dibuka seleksi terbuka (selter), atau memang dilakukan job fit dulu," ujar Hendru saat ditemui, Senin (20/10/2025).

Ia mengingatkan, pada April

jabatan tersebut masih menunggu petunjuk dari Wali Kota Malang selaku pimpinan daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, menjelaskan hingga saat ini belum ada instruksi lanjutan terkait pelaksanaan pengisian jabatan tinggi pratama yang masih kosong. Menurutnya, terdapat dua alternatif mekanisme yang bisa dilakukan untuk mengisi jabatan

2025 lalu sebenarnya telah dilaksanakan uji kompetensi atau job fit bagi seluruh pejabat eselon II di Kota Malang. Namun, menurutnya hasil uji tersebut hingga kini belum ditindaklanjuti untuk proses penempatan jabatan.

"Kita tahu hasil dari yang dilakukan di bulan April 2025 lalu, waktu uji kompetensi, itu kan istilahnya belum dilanjut juga untuk dilaksanakan hasilnya," katanya.

Saat ini, lanjut Hendru, terdapat enam posisi JPTP yang masih kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Keenam posisi tersebut meliputi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, kemudian Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten III Bidang Administrasi Umum, serta Kepala BKPSDM, dan Inspektur.

Disinggung mengenai kemungkinan pengisian jabatan tersebut dilakukan pada tahun 2025 ini, Hendru belum dapat memastikan.

"Ditunggu saja," ucap Heru.

Namun ditegaskannya, secara mekanisme, Pemkot Malang sudah dapat melaksanakan pengisian jabatan tanpa harus menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kecuali untuk pengisian Inspektur, itu harus ada unsur pengawasan yang itu harus berizin ke Irjen Kemendagri," tambahnya.

Di sisi lain, BKPSDM Kota Malang saat ini juga tengah berproses dalam penerapan sistem manajemen talenta ASN. Yang nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan. Hendru menyebut, Kota Malang kini telah memasuki tahap pra-expose untuk mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Di satu-dua minggu ini kami berusaha untuk memperbaiki itu. Setelah pendampingan satu kali lagi, mudah-mudahan bisa expose. Setelah expose itu mudah-mudahan bisa diacc oleh BKN," terangnya. (Santi/Dya)

Skandal Korupsi, Presiden Xi Jinping Pecat 9 Perwira Tinggi Militer

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping memberhentikan sembilan pejabat tinggi militer Partai Komunis karena dugaan korupsi, termasuk dua jenderal di antara mereka.

Dua pejabat militer tersebut adalah He Weidong, jenderal nomor dua di China, dan Miao Hua, Laksamana Angkatan Laut, yang diberhentikan akibat tuduhan korupsi di Tentara Pembebasan Rakyat.

He, Miao, dan tujuh pejabat militer senior lain dituduh melanggar disiplin Partai serta diduga terlibat dalam kejahatan terkait tugas dengan nilai uang yang sangat besar.

"Pelanggaran yang mereka lakukan sangat serius dan memiliki konsekuensi yang sangat merugikan," kata juru bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, dikutip dari Reuters pada Senin (20/10/2025).

Pemecatan He Weidong menandai kali pertama seorang jenderal aktif di Komisi Militer Pusat diberhentikan sejak Revolusi Kebudayaan 1966–1976. Sejak Maret lalu, He tidak terlihat di depan publik.

Sementara itu, Miao Hua diberhentikan dari Komisi Militer



He Weidong, termasuk di antara mereka yang dipecat. (FOTO: Al Jazeera/Reuters)

Pusat pada Juni setelah menjalani penyelidikan terkait pelanggaran disiplin serius sejak November 2024.

Pejabat lain yang dipecat termasuk mantan pejabat senior Departemen Pekerjaan Politik He Hongjun, Wang Xiubin dari Pusat Komando Operasi Gabungan Militer Pusat, mantan komandan Komando Teater Timur Lin Xiangyang, serta dua mantan

komisaris politik di Angkatan Darat dan Angkatan Laut PLA.

Para pengamat menilai bahwa banyak pejabat tersebut telah absen dari publik selama beberapa bulan.

Pengumuman pemecatan para jenderal ini muncul hanya beberapa hari sebelum Komite Sentral Partai Komunis mengadakan Sidang Pleno Keempat di Beijing.

Kasus Korupsi Besar di China

- 2020**
 Li Jianping (Mantan pejabat Daerah Otonomi Mongolia Dalam): Terlibat dalam penggelapan dana.
- 2021**
 Zhao Weiguo (Mantan Chairman Tsinghua Unigroup): Dikenai kasus penyelewengan aset negara.
- 2022**
 Zhou Jiangyong (Mantan Sekretaris Partai Hangzhou): Terbukti melakukan korupsi tingkat tinggi.
- 2023**
 Li Chunsheng (Mantan Wakil Gubernur Guangdong): Tersandung kasus penerimaan suap.
- 2024**
 Ling Chengxing (Mantan Direktur China National Tobacco Corp): Terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- 2025**
 He Weidong (Mantan Wakil Ketua Komisi Militer Sentral): Dijerat atas pelanggaran disiplin dan dugaan korupsi.
- 2025**
 Miao Hua (Mantan Direktur Departemen Politik Komisi Militer Sentral): Diselidiki karena pelanggaran disiplin dan dugaan korupsi.

"Xi memang sedang membersihkan internal. Pemberhentian resmi He dan Miao berarti ia akan menunjuk anggota baru Komite Militer Pusat di Sidang Pleno," kata peneliti di Global China Hub di Atlantic Council, Wen Ti Sung. (Reuters, ist/nei)

Ekonomi China Melambat, Hanya Tumbuh 4,8%

Pertumbuhan ekonomi China melambat menjadi 4,8% pada kuartal ketiga 2025, turun dari 5,2% pada kuartal kedua 2025, menurut data Biro Statistik Nasional (NBS) yang dirilis Senin (20/10/2025). Meski demikian, angka ini masih berada dalam kisaran target yang ditetapkan negara tersebut.



Presiden China Xi Jinping (Antara)

Pertumbuhan ekonomi terhambat oleh penjualan ritel yang hanya naik 3% pada September, menurun dibanding Agustus dan menjadi laju pertumbuhan terendah sejak November.

Meskipun pemerintah telah

meluncurkan program subsidi untuk mendorong konsumsi, angka pengangguran hanya turun sedikit dan masih mendekati level tertinggi enam bulan pada Agustus.

Namun, produksi industri meningkat pada laju tercepat dalam

tiga bulan menjelang Golden Week, periode libur panjang di China. Aktivitas perdagangan, baik ekspor maupun impor, melampaui perkiraan karena perusahaan yang terdampak perang tarif Presiden AS Donald Trump beralih ke pasar baru, didukung juga oleh meningkatnya permintaan domestik akibat belanja selama liburan.

Biro Statistik Nasional (NBS) mengingatkan bahwa risiko dan tantangan eksternal masih tetap ada, sementara dasar pemulihan ekonomi masih lemah. Meski demikian, pertumbuhan 5,2% selama sembilan bulan pertama dianggap memberikan "fondasi yang kuat" untuk mencapai target tahunan sekitar 5%.

"Saya rasa kita tidak bisa menstimulasi permintaan domestik tanpa menstabilkan pasar perumahan terlebih dahulu," ujar

analisis Eurasia Group, Dan Wang kepada CNBC International, merujuk masalah lain China yakni krisis properti yang belum juga pulih.

"China harus meningkatkan upayanya di bidang teknologi, tetapi kami juga sangat yakin bahwa apa yang disebut ekonomi lama akan tetap menjadi tulang punggung perekonomian di masa mendatang," ujar Kepala Ekonom Tiongkok Nomura, Ting Lu, dalam sebuah catatan pekan lalu.

"Beijing harus membereskan kekacauan di sektor properti pada 2026-2030 karena beberapa alasan," tambahnya lagi mencatat bahwa real estat tetap menjadi sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah ekspor terhadap PDB China menyumbang sekitar 18% dari pendapatan pemerintah daerah. (CNBC, Reuters, Bloomberg, ist/nei)

Peer Parenting: Strategi Saling Mendukung dalam Pengasuhan

Sejak lahir, anak terus mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Bayi dan anak-anak belajar dari lingkungan di sekitarnya. Agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dukungan serta pendampingan dari orang tua memiliki peran yang sangat penting.

Di era teknologi dengan arus informasi yang begitu cepat, anak-anak menghadapi berbagai tantangan baru dalam proses tumbuh kembangnya. Masa ini menjadi periode penting untuk membentuk generasi luar biasa yakni generasi yang tangguh, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan dengan kemampuan yang seimbang.

Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendampingi setiap tahap perkembangan anak. Pendampingan yang baik membantu anak tumbuh dengan sehat secara fisik, memiliki mental yang kuat, serta karakter yang positif.

Lalu, apa yang dimaksud dengan peer parenting dan apa manfaatnya bagi orang tua serta anak? Parenting ini bertujuan memberikan ruang bagi para orang tua untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat kemampuan pengasuhan demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Tantangan bagi Orangtua

Salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini adalah kemampuan orang tua, khususnya ibu, dalam mengasuh dan mendidik anak. Membangun generasi yang unggul tidak hanya berkaitan dengan aspek akademis, tetapi juga mencakup kesehatan mental, pembentukan

karakter, dan penanaman nilai etika.

Namun, bagi orang tua muda, proses pengasuhan seringkali menjadi tantangan tersendiri. Mereka menghadapi berbagai tekanan di era modern, seperti tuntutan sosial, tekanan emosional, serta tanggung jawab menyiapkan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, cerdas secara emosional dan finansial, serta berkarakter kuat.

Selain itu, banyak orang tua baru yang mungkin belum memiliki pengalaman atau keterampilan pengasuhan yang memadai. Oleh karena itu, kehadiran peer parenting education menjadi sangat penting sebagai wadah bagi orang tua untuk saling belajar dan mendukung satu sama lain. Parenting ini diharapkan dapat membantu orang tua dalam membentuk generasi penerus yang hebat dan berdaya saing tinggi.

Manfaat Peer Parenting

Dalam Peer Parenting, para orang tua memiliki kesempatan untuk saling berbagi pengalaman mengenai proses tumbuh kembang anak mereka. Melalui kegiatan ini, peserta juga mendapatkan dukungan psikologis yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Parenting ini terbukti berpengaruh

terhadap peningkatan efikasi diri serta perilaku pengasuhan, terutama bagi para orang tua muda.

Berdasarkan hasil penelitian, PPE mampu meningkatkan rasa percaya diri (self-efficacy) dan memperkuat perilaku pengasuhan yang positif dalam mendampingi anak. Peer Parenting ini tidak hanya berdampak pada kualitas pengasuhan, tetapi juga pada aspek perkembangan anak, seperti kemampuan kognitif, bahasa, dan motorik.

Temuan tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan program PPE sebagai sarana pembelajaran dan dukungan bagi orang tua. Melalui kegiatan ini, orang tua dapat memperdalam pemahaman tentang pola asuh yang efektif sekaligus memperoleh motivasi untuk terus berkembang.

Setiap orang tua perlu diingatkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk membesarkan generasi yang tangguh dan berkarakter. Dengan adanya dukungan serta kesempatan untuk belajar dan berbagi pengalaman melalui PPE, mereka dapat menjalankan peran pengasuhan dengan lebih percaya diri dan penuh kasih.

Memanfaatkan Teknologi

Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi semakin pesat. Perkembangan ini membawa dampak ganda positif maupun negatif tergantung pada cara manusia memanfaatkannya. Jika digunakan

secara keliru, teknologi justru dapat memberikan pengaruh yang merugikan. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam membimbing anak agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan berbagi pengetahuan antarorang tua, mereka dapat saling mendukung dan belajar bersama dalam menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan pendampingan yang penuh kasih. Di era digital, anak perlu memiliki kecakapan literasi digital sekaligus kemampuan mengatur penggunaan teknologi. Mereka juga harus mampu menyeimbangkan aktivitas daring dan luring, mengembangkan empati, serta membangun karakter yang tangguh untuk menghadapi tantangan masa depan.

Penting untuk diperhatikan bahwa penggunaan ponsel atau gawai bagi bayi sebaiknya dibatasi. Berdasarkan pedoman nasional dan internasional, anak di bawah usia dua tahun tidak dianjurkan menghabiskan waktu di depan layar, kecuali untuk berkomunikasi melalui panggilan video dengan keluarga atau teman. Anak usia dini belajar paling efektif melalui pengalaman langsung seperti bermain fisik, beraktivitas di luar ruangan, membaca, berkreasi, serta berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Interaksi melalui panggilan video tidak menjadi masalah karena melibatkan komunikasi dua arah. Kegiatan ini justru dapat mendukung perkembangan sosial dan bahasa anak, serta mempererat hubungan emosional dengan keluarga maupun teman. Jika dimanfaatkan dengan bijak, teknologi dapat menjadi alat pendukung yang bermanfaat dalam perjalanan pengasuhan anak. (nei,ist/dya)



Fenomena Langka, Mikroba 40.000 Tahun di Arktik Kembali Bangkit



Mikroba purba yang terperangkap dalam permafrost Arktik selama puluhan ribu tahun berpotensi “bangkit” kembali akibat pemanasan global. Studi terbaru menunjukkan, jika musim panas di wilayah kutub semakin panjang, mikroba tersebut dapat melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang mempercepat pemanasan bumi.

Penelitian di *Journal of Geophysical Research: Geosciences* (23 September 2025) mengungkap bahwa mikroba purba dari Zaman Es dapat aktif kembali hanya dalam beberapa bulan di bawah iklim masa depan. Kebangkitan ini berpotensi memicu feedback loop berbahaya, di mana mencairnya permafrost melepaskan lebih banyak gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global.

Permafrost merupakan lapisan tanah, batu, dan es yang membeku minimal dua tahun berturut-turut. Lapisan teratasnya, active layer, dapat mencair sementara saat gelombang panas terjadi. Namun, mikroba purba tersembunyi jauh di bawah lapisan yang hanya mencair jika suhu meningkat drastis dan bertahan lama. Untuk meneliti hal ini, tim ilmuwan yang dipimpin Tristan Caro dari Caltech melakukan penelitian di Alaska, wilayah yang 85% daratannya tertutup permafrost.

“Mungkin ada satu hari panas di musim panas Alaska, tapi yang jauh lebih penting adalah lamanya musim hangat itu berlangsung hingga ke musim semi dan gugur,” ujar Caro seperti dikutip Live Science.

Caro dan timnya mengambil sampel dari Permafrost Research Tunnel di dekat Fairbanks,

terowongan sedalam 15 meter yang menembus lebih dari 100 meter tanah beku. Lokasi ini dianggap sebagai jendela waktu menuju Pleistosen Akhir, saat mamut dan bison masih hidup di Bumi.

“Begitu masuk ke dalam terowongan, hal pertama yang terasa adalah baunya yang sangat menyengat,” papar Caro, yang melakukan penelitian ini saat masih di University of Colorado Boulder. “Bagi ahli mikrobiologi, itu justru menarik karena bau khas biasanya menandakan adanya aktivitas mikroba.”

Sampel yang dikumpulkan kemudian direndam dalam air yang mengandung deuterium (versi berat dari atom hidrogen), lalu disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu bervariasi, antara -4°C, 4°C, dan 12°C. Tujuannya untuk meniru kondisi musim panas Alaska di masa depan, ketika suhu hangat bisa menembus lapisan tanah beku yang lebih dalam.

Setelah sebulan, belum banyak perubahan. Hanya segelintir mikroba yang “terbangun” dari tidur ribuan tahunnya. Namun setelah enam bulan, hasilnya mengejutkan.

Peneliti menemukan mikroba purba mulai membangun kembali selnya dan memproduksi glikolipid, asam lemak yang membantu bertahan di suhu ekstrem. Aktivitasnya meningkat pesat hingga membentuk biofilm, lapisan lendir yang tampak jelas secara kasat mata. “Sampel ini sama sekali tidak mati,” tegas Caro.

Temuan ini menunjukkan potensi besar dampaknya terhadap iklim Bumi. Mikroba di permafrost menguraikan materi organik beku

dan melepaskan karbon dioksida serta metana saat aktif kembali. Dengan suhu Arktik yang memanas lebih cepat dibanding wilayah lain, pencairan permafrost makin meluas. Jika mikroba purba bangkit, emisi karbon dari lapisan tanah beku bisa melonjak tajam.

Lapisan permafrost di belahan utara Bumi menyimpan dua kali lebih banyak karbon daripada atmosfer saat ini. Jika dilepaskan, karbon tersebut dapat memicu siklus berbahaya antara pencairan, pelepasan gas rumah kaca, dan pemanasan global yang kian parah.

Menurut Sebastian Kopf dari University of Colorado Boulder, pencairan permafrost masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam memprediksi perubahan iklim karena dampaknya terhadap ekologi dan pemanasan global belum sepenuhnya diketahui. Lapisan es beku yang telah terperangkap selama ribuan tahun itu menyimpan jutaan ton karbon organik dan mikroorganisme purba yang tidak aktif.

Peneliti menegaskan, studi ini baru mencakup satu lokasi, sementara mikroba di wilayah lain seperti Siberia atau Kanada mungkin bereaksi berbeda terhadap pemanasan. Hal ini menunjukkan bahwa respons ekosistem terhadap pencairan permafrost bisa sangat bervariasi tergantung pada kondisi lokal, seperti kelembapan tanah, jenis vegetasi, dan tingkat pemanasan.

Jika mikroba purba benar-benar aktif kembali, pencairan permafrost bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga kebangkitan kehidupan kuno yang berpotensi mengubah iklim Bumi serta menimbulkan tantangan baru bagi kesehatan, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan atmosfer global. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Rahasia Kulit Sehat Dimulai dari Jenis Sabun

Apakah kamu tim sabun batang, body wash, atau shower gel? Mungkin kamu sudah memiliki produk perawatan tubuh andalan sejak lama, entah sabun batang yang klasik, body wash dengan tekstur lembut, atau shower gel yang beraroma segar. Namun, pernahkah terpikir mana yang sebenarnya paling baik untuk jenis kulitmu?

Meskipun ketiganya memiliki fungsi utama yang sama, yaitu membersihkan tubuh, ternyata masing-masing memiliki perbedaan dalam formula, tekstur, dan efeknya pada kulit. Setiap jenis sabun juga dapat memberikan hasil yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan kondisi kulit setiap orang.

Agar tidak salah memilih produk, penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis sabun. Penjelasan dari para dermatolog dapat membantu menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kulit, sehingga perawatan tubuh menjadi lebih optimal.

Shower Gel vs Body Wash

Meskipun sering dianggap sama, shower gel dan body wash sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Shower gel umumnya memiliki tekstur lebih kental, menghasilkan busa yang lebih banyak, serta aroma yang kuat dan menyegarkan. Karena formulanya yang ringan, produk ini cocok untuk kulit berminyak atau bagi mereka yang mudah merasa gerah setelah

beraktivitas.

Di sisi lain, body wash memiliki tekstur yang lebih lembut dan creamy. Produk ini biasanya diformulasikan dengan emollient serta bahan pelembap seperti shea butter atau hyaluronic acid. Fungsinya tidak hanya membersihkan, tetapi juga membantu menjaga kelembapan alami kulit.

Bagi pemilik kulit kering, body wash bisa menjadi pilihan tepat karena mampu menjaga kulit tetap lembap dan halus setelah mandi. Sementara itu, shower gel lebih cocok digunakan saat menginginkan sensasi segar dan bersih maksimal, terutama setelah aktivitas berat atau cuaca panas.

Sabun Batang

Sabun batang sering dianggap sebagai produk yang "jadul", padahal hingga kini masih banyak digunakan. Sabun jenis ini umumnya terbuat dari kombinasi lemak atau minyak alami, air, dan alkali seperti sodium hydroxide yang berfungsi untuk mengangkat kotoran serta minyak berlebih dari kulit.

Formulanya yang sederhana menjadikan sabun batang tetap menjadi

pilihan praktis bagi banyak orang. Pada masa lalu, sabun batang dikenal dapat membuat kulit terasa kering karena memiliki kadar pH yang tinggi. Namun, seiring perkembangan teknologi kecantikan, kini banyak merek yang menghadirkan sabun batang dengan formula lebih lembut dan pH seimbang. Perubahan ini membuat sabun batang modern lebih aman dan nyaman digunakan untuk berbagai jenis kulit.

Selain manfaatnya untuk membersihkan, sabun batang juga dinilai lebih ramah lingkungan karena umumnya tidak memerlukan banyak kemasan plastik. Hal ini menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan bagi mereka yang peduli terhadap isu lingkungan.

Sabun batang cocok digunakan oleh pemilik kulit berminyak atau yang mudah berjerawat, terutama di area punggung dan dada. Namun, bagi kulit kering, sebaiknya pilih sabun batang dengan tambahan bahan pelembap seperti olive oil, aloe vera, atau glycerin agar kulit tetap terasa halus dan tidak mudah kering setelah mandi.

Pilih Sesuai Jenis Kulitmu

Jika kulit terasa kering, sebaiknya pilih body wash atau shower gel yang mengandung bahan pelembap dan memiliki tekstur creamy. Kandungan seperti shea butter, glycerin, atau hyaluronic acid dapat membantu menjaga kelembapan kulit agar tetap halus dan tidak mudah pecah-pecah. Hindari juga produk dengan pewangi terlalu kuat karena bisa membuat kulit semakin kering dan iritasi.

Untuk kulit berminyak, shower gel atau sabun batang bisa menjadi solusi yang tepat. Kedua jenis produk ini umumnya memiliki formula yang mampu membantu mengontrol produksi sebum sekaligus membersihkan pori-pori secara menyeluruh tanpa meninggalkan rasa lengket di kulit.

Sementara bagi pemilik kulit sensitif, pilihlah body wash dengan formula lembut dan bebas pewangi. Produk yang tidak mengandung alkohol, sulfat, atau bahan kimia keras akan lebih aman digunakan karena tidak terlalu mengubah keseimbangan pH alami kulit.

Perlu diingat, tidak ada satu jenis sabun yang paling baik untuk semua orang. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada jenis kulit serta preferensi pribadi. Sabun batang dikenal lebih ramah lingkungan, shower gel menawarkan sensasi segar, sedangkan

body wash unggul dalam memberikan kelembapan ekstra.

Memahami kebutuhan kulit menjadi langkah penting sebelum menentukan produk pembersih tubuh yang tepat. Dengan mengenali kondisi kulit, kamu bisa menyesuaikan jenis sabun agar hasilnya lebih maksimal dan tidak menimbulkan masalah baru seperti iritasi atau kekeringan.

Sebelum mandi, coba perhatikan apa yang paling dibutuhkan kulitmu saat itu: kelembapan, kesegaran, atau pembersihan mendalam. Kunci kulit sehat tidak terletak pada seberapa banyak busa yang dihasilkan, melainkan pada seberapa tepat produk yang kamu pilih untuk merawat kulitmu. (nei,ist/dya)

Kandungan Sabun untuk Kulit Berminyak

1. Lidah buaya.
2. Oat.
3. Rosemary.
4. Lemon.
5. Garam laut.

Kandungan Sabun untuk Kulit Berminyak

1. Minyak jojoba.
2. Gliserin.
3. Lidah buaya.
4. Cocoa butter.
5. Shea butter.
6. Minyak zaitun.

Kandungan Sabun untuk Kulit Berminyak

1. Polifenol.
2. Chamomile.
3. Madu.
4. Susu.
5. Vitamin E.



Gegara Tambang Ilegal, ...dari hal 1

Presiden Prabowo mengatakan, bahwa tugas untuk memberantas pertambangan ilegal masih panjang. Karena masih banyak tambang ilegal yang merajalela di Indonesia. "Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun," tegas Prabowo saat mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025).

Sebagai contoh, penyelundupan timah di Bangka Belitung (Babel) yang sudah dilakukan penertiban oleh TNI, dibantu Kejaksaan Agung, Polisi, hingga bea cukai.

"Diperkirakan kerugian itu Rp 40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi, kita bisa bayangkan Rp 30 triliun atau Rp 40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya, Rp 20 triliun tiap tahun. Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji, sekitar US\$ 3 miliar dollar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah Rp 800 Triliun," jelas Prabowo.

Atas hal itu, Prabowo mempertanyakan apa yang bisa dibangun dengan menipu negara. Segala bentuk cara dan modusnya dikeluarkan dalam hal menipu.

"Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komunitas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan. Nipu pada bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi, fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi, saya kira intinya itu," tandas Prabowo.

Oleh karenanya, Kepala Negara meminta Kejagung dan Polri sebagai penegak hukum tidak menyerah untuk bekerja keras melawan korupsi, manipulasi dan penyelewengan.

Prabowo juga mewanti-wanti agar pejabat tidak lengah iman, sehingga berujung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta.

"Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita itu, harta itu adalah harta yang haram. Rezeki yang tidak baik dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapa pun dan keluarganya," kata Prabowo.

Prabowo meminta supaya APH juga tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah dalam menegakkan hukum. "Yang kuat kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah," kata Prabowo.

"Saya ingat bener ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap, karena mencuri ayam. Saya ingat bener itu, ini tidak masuk diakal,

hakim jaksa, ada apa ngejar itu. Anda ingat pasti peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon, mungkin ingat juga peristiwa itu. Ada apa?" tegas Prabowo.

"Penegak hukum harus punya hati. Jangan istilahnya apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah, harus dibela harus dibantu. Kalau perlu si hakim, jaksa atau polisi pakai uang nya sendiri, ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya inget, saya panggil ke Hambalang saya kasih beasiswa," paparnya.

Oleh sebab itu, Prabowo meminta kepada seluruh pihak untuk terus fokus menegakkan hukum seadil-adilnya. Tujuannya semata untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia untuk sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Marilah kita bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan semua kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat kaya, sangat kaya kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian kelola dengan baik. Indonesia akan cepat bangkit, saya percaya itu, saya yakin itu," ujar Prabowo.

RI Salah Satu Negara Paling Banyak Izin Tambang, Capai 5.300!

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang saat ini paling banyak mengeluarkan izin tambang. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 5.300 izin usaha pertambangan (IUP).

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa angka tersebut menunjukkan betapa masifnya kegiatan pertambangan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

"Kita perlu sampaikan bahwa kita ini salah satu negara yang memiliki jumlah perizinan di industri pertambangan ini paling gede di dunia. Dengan sekitar 5.300an izin. Itu luar biasa lah kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain," ujar Tri dikutip CNBC Indonesia, Senin (20/10/2025).

Tri mengaku sekitar periode tahun 2006 hingga 2007, industri pertambangan di Indonesia mulai berkembang pesat. Bahkan puncak produksi batu bara terjadi pada tahun 2024.

Sementara untuk komoditas nikel pergerakannya juga terus meningkat hingga saat ini. Kondisi tersebut mencerminkan dinamika yang terjadi di sektor pertambangan nasional.

Tri lantas menilai, apabila berkaca dengan beberapa negara maju, misalnya yang terdekat yakni Australia, apabila terjadi kecelakaan

tambang dan lokasi tersebut ditutup oleh inspektur tambang, pihak perusahaan akan mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku tanpa pengecualian.

"Saya pernah ke sana terus kemudian mencoba bertanya kenapa tambang ini 6 bulan masih tutup, karena kami belum yakin apakah kecelakaan ini akan terjadi lagi," ujar Tri

"Tingkat kesadaran untuk industri itu semakin tinggi. Nah, poin yang ingin kita sampaikan, memang di RKAB yang dulu kita menginginkan dokumen itu banyak. Kenapa? Supaya perusahaan itu taat asas kira-kira seperti itu," tambahnya.

Oleh sebab itu, pemerintah kemudian melakukan evaluasi untuk implementasi di dalam negeri. Adapun, di dalam RKAB yang telah diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, sejumlah ketentuan disederhanakan.

"Beberapa yang merupakan tanggung jawab perusahaan itu kita serahkan kepada perusahaan," katanya.

Ada 1.517 Tambang Ilegal di Indonesia

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) mengungkapkan setidaknya ada 1.517 tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan 396 tambang ilegal.

Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu (Wadirtipidter) Bareskrim Polri, Feby Dapot Hutagalung, telah memetakan 38 provinsi di Indonesia. Hasilnya, ditemukan 33 provinsi terdapat tambang ilegal.

"Di setiap provinsi hampir seluruhnya terdapat kegiatan pertambangan ilegal. Mulai dari Aceh sampai dengan ke Papua semuanya ada. Inilah kekayaan alam Indonesia yang kaya akan sumber daya alam tetapi tidak dimanfaatkan secara baik," ujar Feby dilansir Kompas, Kamis (16/10/2025).

Komoditas tambang ilegal yang terdata Bareskrim meliputi emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah, dan lainnya.

Feby menyebut sebagian besar aktivitas tambang ilegal tersebut dibekingi oleh oknum, mulai dari anggota Kepolisian, anggota partai politik, tokoh adat, hingga tokoh masyarakat. "Sehingga ini sangat menjadi permasalahan krusial di lapangan pada saat kita akan melakukan penindakan tegas," ucapnya.

Bareskrim Polri pun mencatat sepanjang 2023 hingga 2025, baru dapat menindak sekitar 108 perkara terkait tambang ilegal.

Sementara itu, aktivitas pertambangan ilegal juga ditemukan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN menemukan area tambang tanpa izin yang mencapai 4.000 hektare, tepatnya di kawasan konservasi Bukit Tengkorak, Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan temuan ini dan menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas untuk menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal di kawasan strategis tersebut. "Kami telah memasang plang larangan agar tidak ada pihak manapun melakukan aktivitas tambang di kawasan hutan lindung," tegas Basuki, Kamis (16/10/2025).

Menurut laporan Satgas, aktivitas tambang ilegal di wilayah IKN tidak hanya merusak ekosistem hutan secara masif, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang sangat signifikan bagi negara.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin, mengungkapkan bahwa perhitungan awal kerugian negara akibat praktik ilegal ini diperkirakan mencapai Rp 5,7 triliun. Angka fantastis tersebut berasal dari: Batu bara yang hilang (periode 2016–2024) Rp 3,5 triliun; Kerusakan hutan dan kayu Rp 2,2 triliun; Kerusakan lingkungan lainnya masih dalam proses perhitungan lanjutan.

Penanganan tambang batu bara ilegal ini didukung penuh oleh berbagai pihak, termasuk Polda Kalimantan Timur yang turut memasang tanda larangan di lokasi tambang. Selain penutupan, pengusaha tambang yang sudah terlanjur beroperasi diwajibkan melakukan reforestasi atau pemulihan lahan di bekas area tambang.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung Otorita IKN dalam menanggulangi aktivitas ilegal ini dan memastikan pembangunan IKN berjalan berkelanjutan," tambah Basuki.

Menanggapi temuan tersebut, Direktur Penegakan Pidana Kementerian ESDM, Ma'mun, mengimbau masyarakat atau pengusaha yang ingin menjalankan usaha pertambangan agar segera mengurus izin dan legalitas sesuai prosedur yang berlaku.

"Silakan pelajari bagaimana proses perizinan tambang agar usahanya legal. Sayang jika kekayaan alam yang besar ini justru rusak dan tidak memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat," ujarnya, menekankan pentingnya kepatuhan hukum demi pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan. (han,ist/lut)



DPRD SURABAYA MINTA PERCEPATAN PROGRAM RUTILAHU

Laila Mufidah: Pastikan Tepat Sasaran

SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah, menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dan percepatan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) agar benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.

Sorotan ini muncul setelah dirinya menerima laporan dari warga di kawasan Kendangsari, Surabaya, yang rumahnya nyaris roboh namun belum mendapatkan bantuan perbaikan. Menurut Laila, kasus seperti ini menunjukkan masih adanya celah dalam proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan.

“Program Rutilahu ini sebenarnya sangat baik dan berpihak kepada masyarakat kecil. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada yang belum tepat sasaran. Kalau pemerintah kota sudah siap, sebaiknya segera dieksekusi agar warga tidak lagi hidup dalam kekhawatiran,” ujar Laila, Senin (20/10/2025).

Laila menuturkan, warga yang melaporkan kasus tersebut



Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah meninjau salah satu rumah warga Kendangsari usai di renovasi. (Dok. Pribadi)

merupakan keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Sang suami menderita stroke dan tidak bisa bekerja, sementara sang istri tidak memiliki penghasilan tetap. Keluarga itu kini bergantung pada anak-anaknya yang juga berpenghasilan pas-pasan.

“Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Hidupnya dari bantuan anak-anaknya yang juga pas-pasan. Parahnya, sudah tiga tahun keluarga ini tidak mendapat bantuan apa pun dari pemerintah,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Soroti Peran RT/RW hingga Keluraga

Laila juga menyoroti peran perangkat wilayah yang dinilainya perlu lebih aktif melakukan pendataan dan pengawasan terhadap warga miskin di lingkungannya. Ia berharap kerja sama antara RT, RW, kelurahan, dan pemerintah kota bisa diperkuat agar bantuan sosial dapat tersalurkan dengan adil dan efisien.

“Perangkat wilayah memiliki peran penting. Mereka yang paling tahu kondisi warganya. Jadi, kalau ada kasus seperti ini, seharusnya bisa langsung ditindaklanjuti. Saya akan usulkan agar keluarga tersebut segera mendapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya,” tegasnya.

Tak hanya itu, Laila juga meminta agar dalam proses pembangunan rutilahu ini bisa cepat diselesaikan, agar warga tidak menunggu waktu terlalu lama.

“Waktu itu di survei tanggal 1 Mei dikerjakan bulan Agustus, waktu pengerjaan sekitar 3 bulan. Nah orangnya itu sempat kos selama 3 bulan. Jadi sebenarnya sudah direalisasi, cuma ke depannya saya minta tolong harus lebih cepat pengerjaannya apalagi akan ada tambahan kuota di 2025 dan 2026 nanti. Jadi gimana caranya anggaran yang sudah ada dan pagu yang sudah ada segera dilakukan,” tutunya.

Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola bantuan sosial yang lebih tepat guna. Dengan langkah-langkah konkret yang dilakukan, diharapkan program Rutilahu tidak hanya memperbaiki bangunan fisik rumah, tetapi juga meningkatkan martabat dan

kesejahteraan keluarga pra-sejahtera di Surabaya.

“Kita semua ingin warga Surabaya hidup layak dan bahagia. Tidak boleh ada lagi warga yang tinggal di rumah nyaris roboh tanpa bantuan. DPRD dan Pemkot akan terus bersinergi untuk memastikan program ini berjalan sesuai harapan,” tutup Laila.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 tetap fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemkot Surabaya, kata Eri, terus berkomitmen memperkuat program sosial, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, termasuk melalui perbaikan rumah tidak layak huni.

Beberapa program strategis yang akan dilanjutkan tahun depan di antaranya Satu Keluarga Satu Sarjana, bantuan operasional pendidikan untuk sekolah swasta, serta peningkatan jumlah bantuan perbaikan Rutilahu. Eri menyebutkan, Pemkot Surabaya bersama DPRD kini tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rumah Layak Huni sebagai dasar hukum agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

“Perda ini kami susun agar ada mekanisme yang jelas dan transparan. Harapannya, bantuan benar-benar diterima oleh warga yang paling berhak. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih terukur dan berkelanjutan,” jelas Eri.

Ia menambahkan, Pemkot Surabaya juga berencana memperkuat sistem pendataan warga berbasis digital agar tidak ada lagi penerima bantuan ganda atau warga miskin yang terlewat dari pendataan. Sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan program ini. (advam/lut)

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah (Dok.Pribadi)

